



•
**TELAAH
KURIKULUM**
(Teori Pengkajian Kurikulum)

Junifer Siregar, S.Pd., M.Pd

TELAAH KURIKULUM

TELAAH KURIKULUM

(Teori Pengkajian Kurikulum)

TELAAH KURIKULUM

(Teori Pengkajian Kurikulum)

Junifer Siregar, S.Pd., M.Pd



TELAAH KURIKULUM

(Teori Pengkajian Kurikulum)

Penulis:

Junifer Siregar, S.Pd., M.Pd

Editor:

Apriani Sijabat

Layouter :

Tim Kreatif PRCI

Cover:

Rusli

Cetakan Pertama : Oktober 2022

Hak Cipta 2022, pada Penulis. Diterbitkan pertama kali oleh:

Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

ANGGOTA IKAPI JAWA BARAT

Pondok Karisma Residence Jalan Raflesia VI D.151

Panglayungan, Cipedes Tasikmalaya – 085223186009

Website : www.rcipress.rcipublisher.org

E-mail : rumahcemerlangindonesia@gmail.com

Copyright © 2022 by Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia

All Right Reserved

- Cet. I – : Perkumpulan Rumah Cemerlang Indonesia, 2022

; 14,8 x 21 cm

ISBN : 978-623-448-240-9

Hak cipta dilindungi undang-undang

Dilarang memperbanyak buku ini dalam bentuk dan dengan cara apapun tanpa izin tertulis dari penulis dan penerbit

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang

Hak Cipta Pasal 72

Undang-undang No.19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
Pasal 72

Barang siapa dengan sengaja melanggar dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal ayat (1) atau pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling sedikit 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Barang siapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu ciptaan atau barang hasil pelanggaran hak cipta terkait sebagai dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah)

KATA PENGANTAR

Telaah kurikulum merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa yang mengambil program studi kependidikan. Hal inilah yang memotivasi penulis menulis buku ini. Buku ini disusun agar membantu dalam pengembangan wawasan keilmuan dalam bidang kurikulum. Buku ini dimulai dari hakikat kurikulum, sistem pendidikan nasional, sejarah perkembangan kurikulum di Indonesia, model dan pendekatan kurikulum, landasan pengembangan kurikulum, struktur kurikulum, hingga perangkat-perangkat pembelajaran.

Materi yang disajikan sederhana, agar mudah dipahami. Diharapkan dengan membaca dan memahami materi-materi yang terdapat dalam buku ini, dapat membantu para pembaca dalam mengenal kurikulum, menganalisis kurikulum, melaksanakan kurikulum, dan menyusun perangkat-perangkat pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang diterapkan.

Penulis menyadari masih banyak kekurangan dalam buku ini. Baik konten, cara penulisan, dan lainnya. Sehingga buku ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu penulis mengharapkan masukan, kritik yang konstruktif, demi perbaikan pada revisi berikutnya. Akhir kata, atas masukan dan perhatian dari para pembaca, penulis mengucapkan terimakasih.

Pematangsiantar, Oktober 2022

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
BAB I HAKIKAT KURIKULUM	1
A. Pengertian Kurikulum	1
B. Fungsi Kurikulum	9
1. Fungsi Pendidikan Umum (Common and General Education)	9
2. Suplementasi (Supplementation)	9
3. Eksplorasi (Exploration)	10
4. Keahlian (Specialization)	10
5. Fungsi Penyesuaian (The Adjustive of Adaptive Function)	12
6. Fungsi Integrasi (The Integrating Function)	13
7. Fungsi Diferensiasi (The Differentiating Function)	13
8. Fungsi Persiapan (The Propaedeutic Function)	13
9. Fungsi Pemilihan (The Selective Function)	14
10. Fungsi Diagnostik (The Diagnostic Function)	14
C. Tujuan Kurikulum	14
BAB II SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL	16
A. Pengertian Pendidikan Nasional	16
B. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional	17
C. Kelembagaan, Program, dan Pengelolaan Pendidikan Nasional	19
D. Permasalahan Sistem Pendidikan Nasional dan Solusi Pemecahan Masalah	28
E. Upaya Pembangunan Pendidikan Nasional	32
BAB III SEJARAH PERKEMBANGAN KURIKULUM PENDIDIKAN DI INDONESIA	34
A. Kurikulum Yang Pernah Diterapkan Dalam Pendidikan Indonesia	34
1. Rencana Pelajaran 1947	35
2. Rencana Pelajaran Terurai 1952	35
3. Kurikulum 1968	36
4. Kurikulum 1975	37
5. Kurikulum 1984	37

6. Kurikulum 1994 dan Suplemen Kurikulum 1999	38
7. Kurikulum 2004	38
8. KTSP 2006	39
9. Kurikulum 2013	40
B. Kurikulum Merdeka Belajar	40
C. Mengapa kita memerlukan Kurikulum Merdeka?	42
BAB IV MODEL DAN PENDEKATAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	44
A. Model-model Pengembangan Kurikulum	44
1. Model Ralph W. Tyler (1949)	45
2. Model George A. Beauchamp (1964)	48
3. Model J. Galen Saylor, William M. Alexander, dan Arthur J. Lewis (1981)	50
4. Model Hilda Taba (1962)	52
5. Model Peter F. Oliva	54
B. Pendekatan Pengembangan Kurikulum	57
1. Pendekatan Pengembangan Kurikulum dari Sudut Pandang Kebijakan	58
2. Pendekatan Pengembangan Kurikulum dari Sudut Pandang Pengorganisasian Isi Kurikulum	60
BAB V LANDASAN PENGEMBANGAN KURIKULUM	64
A. Urgensi Landasan Pengembangan Kurikulum	64
B. Kajian Teori dan Landasan Pengembangan Kurikulum	66
1. Landasan Filosofis	68
2. Landasan Psikologis	76
3. Landasan Sosiologis	78
4. Landasan Teknologis	89
BAB VI STRUKTUR DAN KOMPONEN KURIKULUM	91
A. Struktur Kurikulum	91
1. Struktur Kurikulum Sekolah Dasar (SD)	94
2. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama (SMP)	96
3. Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas (SMA)	98
4. Struktur Kurikulum Pendidikan Kejuruan	105
B. Komponen Kurikulum	105
1. Komponen Tujuan	106
2. Komponen Bahan Ajar	107
3. Komponen Proses Pembelajaran	111
4. Komponen Evaluasi	112
C. Hubungan Antar Komponen-komponen Kurikulum	115
D. Karakteristik Perencanaan Kurikulum	117
BAB VII PERANGKAT PEMBELAJARAN	122

A.	Pengertian Perangkat Pembelajaran	122
B.	Jenis-jenis Perangkat Pembelajaran	123
	1. Silabus	123
	2. Standar Kompetensi (SK).	126
	3. Kompetensi Dasar (KD).	126
	4. Indikator.	126
	5. Materi Pokok.	127
	6. Pengalaman Belajar.	127
	7. Alokasi Waktu.	127
	8. Sumber / Bahan / Alat.	127
	9. Penilaian.	127
	10. Skenario pembelajaran.	128
	11. Analisis hasil belajar dan program tindak lanjut	128
	12. Program Tahunan	128
	13. Program Semester	130
C.	Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	131
D.	Cara Menyusun Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)	134
E.	Kalender Akademik	136
	1. Pengertian Kalender Akademik	136
	2. Cara-cara Penetapan Kalender Akademik	137
	3. Rincian Pekan Efektif	137
F.	Peranan Perangkat Pembelajaran Bagi Guru	139
	DAFTAR PUSTAKA	141

BAB I

HAKIKAT KURIKULUM

A. Pengertian Kurikulum

Istilah kurikulum berasal dari kata “*curere*” yang dalam bahasa lain artinya adalah lintas balap yang harus diselesaikan (Nasution, 2002). *Curere* ini yang berkembang dalam bahasa Inggris menjadi “*curriculum*”. Dalam dunia pendidikan Indonesia, istilah tersebut belum digunakan ketika bangsa Indonesia menyatakan dirinya merdeka dan berdaulat atas wilayah yang dulunya dinamakan Hindia Belanda apalagi ketika Pemerintah Hindia Belanda memperkenalkan sistem pendidikan Barat sebagai politik balas budi di Indonesia. Istilah yang digunakan pada saat itu adalah *leerplan* atau rencana pelajaran untuk kurikulum dan *leervak* untuk mata pelajaran. Istilah Rencana Pelajaran terus digunakan setelah Indonesia merdeka sampai pada tahun 70-an. Pada tahun 1967 dunia pendidikan Indonesia masih menggunakan istilah Rencana Pelajaran dan Susunan Mata Pelajaran (untuk struktur kurikulum) (Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1996). Kenyataan seperti itu bukanlah eksklusif terjadi di Indonesia karena di negara asalnya, istilah kurikulum di Amerika Serikat baru masuk dalam literature pendidikan pada abad-19 dan mulai mendapatkan tempat yang luas pada awal abad ke-20 (Tanner dan Tanner, 1980:4). Sebelum istilah kurikulum digunakan, istilah *paedogogy* adalah istilah umum yang digunakan bersamaan dengan istilah didaktik dan metodik.

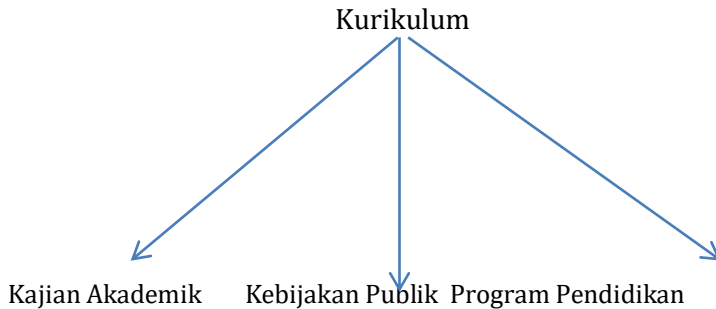
Istilah kurikulum masuk kedalam dunia pendidikan Indonesia berasal dari literatur kependidikan Amerika Serikat. Tokoh pendidikan Amerika seperti John Dewey

(1916), Bobbit (1992), Benjamin (1939), dan Ralph Tyler (1942) dianggap sebagai pelopor penggunaan istilah kurikulum dalam dunia pendidikan di Amerika Serikat. Ketika tahun 50-an dan 60-an istilah kurikulum sudah menjadi istilah yang banyak digunakan para ahli pendidikan di Amerika Serikat. Pada waktu itu banyak ahli pendidikan Indonesia belajar di Amerika Serikat dan membaca buku-buku dari belahan dunia yang berbahasa Inggris itu maka istilah kurikulum masuk menjadi istilah teknis di Indonesia dalam literatur dunia pendidikan Indonesia. Secara resmi, istilah kurikulum mengumumkan adanya kurikulum 1968 untuk menggali kurikulum yang berlaku sebelumnya.

Baik di Amerika Serikat maupun di negara lainnya termasuk Indonesia, istilah kurikulum digunakan dalam banyak pengertian atau definisi. Sejalan dengan perkembangan pemikiran mengenai kajian tentang kurikulum sebagai suatu program pendidikan maka banyak definisi yang diperkenalkan. Dapat dikatakan bahwa setiap ahli mengemukakan pendapat yang dianggap lebih sesuai menggambarkan konsep kurikulum yang mewakili pengertian yang diinginkan. Setiap ahli mempunyai konsepsi tentang kurikulum yang mereka kembangkan dari pandangan filosofi pendidikan dan kurikulum yang mereka anut. Filosofi pendidikan dan kurikulum yang dianut membentuk cara pandang, memberikan penekanan, makna utama suatu kegiatan pendidikan, menentukan mana yang penting dan harus ada, menjadi landasan untuk mengembangkan teori, mengidentifikasi, dan menganalisis fenomena.

Selain dari apa yang telah dikemukakan di atas, perbedaan pengertian kurikulum disebabkan oleh berbagai cara pandang atau domain kajian yang dinamakan kurikulum.

Keseluruhan konstruk kurikulum meliputi ketiga domain berikut:



Gambar 1 Domain Kurikulum

Sebagai suatu bidang kajian akademik, kurikulum adalah suatu disiplin ilmu yang secara universal merupakan bidang kajian pada jenjang pendidikan pascasarjana. Kurikulum adalah bagian dari ilmu pendidikan dan berada dalam lingkungan kelompok ilmu-ilmu sosial. Sesuai dengan kedudukan itu maka kurikulum mempelajari fenomena empirik yang berkenaan dengan aktivitas manusia dalam mempersiapkan kehidupan masa depan generasi penerus melalui suatu proses yang direncanakan untuk mengembangkan seluruh potensi setiap individu generasi penerus.

Schubert (1984) mengemukakan bahwa disiplin kurikulum terdiri atas teori kurikulum, pengembangan kurikulum, sejarah kurikulum, desain kurikulum, implementasi kurikulum, evaluasi kurikulum, dan penelitian kurikulum. Perkembangan akhir-akhir ini menunjukkan bahwa disiplin kurikulum telah pula merambah dan memperkaya dirinya dengan kajian mengenai sosiologi

kurikulum , antropologi kurikulum, manajemen kurikulum, dan kebijakan kurikulum. Kajian-kajian yang dapat dilakukan misalnya berkenaan dengan isu seperti kemiskinan, gender, dan kurikulum, politik dan kurikulum, pressure sosial dan kurikulum, teknologi dalam kurikulum, dan sebagainya. Dengan demikian seseorang yang belajar kurikulum dapat mengembangkan spesialisasi kajiannya dalam salah satu bidang tersebut.

Sebagai kebijakan publik (*public policy*), kurikulum adalah suatu kebijakan pendidikan berupa rancangan yang berkenaan dengan proses pembelajaran. Proses pembelajaran adalah proses pengembangan

Dalam kedudukannya sebagai program pendidikan, secara filosofis dan konseptual, kurikulum adalah jawaban dunia pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat dalam membangun kualitas generasi muda untuk kehidupan mereka di masa yang akan datang.

Sesuai dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2003 menerangkan bahwa “Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu.”

Sedangkan menurut Romine (1954). Pandangan ini digolongkan sebagai pendapat yang baru, yang di rumuskan sebagai berikut: “*Curriculum is interpreted to mean all of the organized courses, activities, and exsperiences which pupils have under direction of the school, whether in the classroom or not*” (Hamalik, 2008). Pengertian ini mempunyai implikasi sebagai berikut:

- a) Tafsiran tentang kurikulum bersifat luas, karena kurikulum bukan hanya terdiri atas mata pelajaran

- (*courses*) tetapi meliputi semua kegiatan dan pengalaman yang menjadi tanggung jawab sekolah.
- b) Sesuai dengan pandangan ini, berbagai kegiatan di luar kelas (yang di kenal dengan ekstrakurikuler) sudah tercakup dalam pengertian kurikulum. Oleh karena itu, tidak ada pemisahan antara intra dan ekstrakurikuler. Begitu pula dengan *college preparatory curriculum*, *vocation curriculum*, dan *general curriculum*, semuanya sudah tercakup dalam pengertian kurikulum seperti yang di kemukakan tadi.
 - c) Pelaksanaan kurikulum tidak hanya dibatasi oleh keempat dinding saja, melainkan dilaksanakan baik di dalam maupun di luar kelas, sesuai dengan tujuan yang hendak dicapai.
 - d) Sistem penyampaian yang dipergunakan oleh guru disesuaikan dengan kegiatan atau pengalaman yang akan disampaikan. Oleh karena itu, guru harus mengadakan berbagai kegiatan belajar-mengajar yang bervariasi, sesuai dengan kondisi siswa.
 - e) Tujuan pendidikan bukanlah untuk menyampaikan mata pelajaran (*courses*) atau bidang pengetahuan yang tersusun (*subject*) melainkan pembentukan pribadi anak dan belajar cara hidup di dalam masyarakat. (Hamalik : 2008)

Sedangkan Arifin (2014), mengartikan pengertian kurikulum secara modern merupakan semua kegiatan dan pengalaman potensial (isi/ materi) yang telah disusun secara ilmiah, baik yang terjadi di dalam kelas, di halaman sekolah maupun di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah untuk mencapai tujuan pendidikan. Implikasi pengertian ini, antara lain: *Pertama*, kurikulum tidak hanya terdiri atas sejumlah mata pelajaran, tetapi juga meliputi semua kegiatan dan

pengalaman potensial yang telah disusun secara potensial. *Kedua*, kegiatan dan pengalaman belajar tidak hanya terjadi di sekolah, tetapi juga di luar sekolah atas tanggung jawab sekolah. *Ketiga*, guru sebagai pengembang kurikulum perlu menggunakan multi strategi dan pendekatan, serta berbagai sumber belajar secara bervariasi. *Keempat*, tujuan akhir kurikulum bukan untuk memperoleh ijazah, tetapi untuk mencapai tujuan pendidikan.

Selanjutnya, Oliva (1997:29) menyatakan:

Curriculum is a product of its time. Curriculum responds to and is changed by social forces, philosophical positions, psychological Principles, accumulating knowledge, and educational leadership at its moment in history

Pengertian ini sangat mendasar menggambarkan hakikat kurikulum yang sebenarnya sebagai program pendidikan. Sebagai esensi dari proses Pendidikan maka kurikulum dibangun atas dasar kebutuhan masyarakat dan mengenai kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa di masa depan. Dalam pengertian tersebut maka kurikulum adalah suatu yang dipersiapkan untuk, membangun kehidupan bangsa, masyarakat, dan individu peserta didik di masa depan. Pembangunan kehidupan bangsa dan masyarakat dilakukan melalui pengembangan potensi individu peserta didik yang akan menjadi anggota masyarakat dan warga negara produktif suatu bangsa. Arah pengembangan tersebut adalah Tujuan Pendidikan Nasional yang kemudian diterjemahkan menjadi kemampuan lulusan setiap jenjang pendidikan. Kemampuan setiap jenjang tersebut dirumuskan dalam Standar Kompetensi. Jadi secara operasional kurikulum

dikembangkan untuk memberi kenikmatan belajar kepada peserta didik mencapai kemampuan yang dipersyaratkan.

Oleh karena itu, sudah seharusnya proses pengembangan kurikulum diawali dengan analisis tentang kehidupan masyarakat dan bangsa di depan, kualitas warga masyarakat dan warga negara yang akan melanjutkan dan mengembangkan kehidupan masyarakat tersebut ke arah yang lebih baik. Konsep kehidupan masyarakat dan bangsa tersebut meliputi berbagai aspek-aspek kehidupan masyarakat masa kini yang perlu dan harus dilanjutkan masa depan, ditingkatkan, dan diubah untuk disesuaikan dengan kebutuhan kehidupan masa mendatang. Untuk itu, kurikulum harus menjawab bagaimana kualitas yang perlu dimiliki generasi muda sebagai pewaris pengembang kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Artinya, kurikulum selalu berorientasi pada apa yang sudah dimiliki masyarakat dan bangsa masa kini dan apa yang perlu dimiliki masyarakat dan bangsa di masa depan untuk membangun suatu kehidupan bermasyarakat, berbangsa, serta bernegara yang sehat dan bermartabat.

Kualitas kehidupan masyarakat dan bangsa yang sehat dan bermartabat di masa depan ditentukan melalui suatu keputusan politik bangsa. Keputusan politik tersebut dapat berbentuk Undang-undang Dasar, undang-undang bentuk lainnya tergantung pada sistem pendidikan yang berlaku. Bangsa Indonesia, keputusan politik tersebut ditetapkan dalam UUD 1945 NKRI, UU Sisdiknas, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional, Peraturan Pemerintah Daerah, dan ketetapan pada jenjang yang lebih rendah seperti Dewan Pendidikan atau pun Komite Sekolah, sesuai dengan tingkat kebutuhan masyarakat yang dilayani suatu kurikulum. Kualitas kehidupan bangsa secara nasional tentu saja

dibangun berdasarkan analisis kebutuhan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat dan berbangsa serta kehidupan antar-bangsa. Kualitas kehidupan suatu masyarakat di daerah tertentu tentu saja ada persamaan dengan kualitatif kehidupan berbangsa secara nasional tetapi juga memiliki kekhasan tertentu yang berbeda dari lingkungan masyarakat lainnya. Perbedaan-perbedaan merupakan kekayaan nasional dan menjadikan suatu karakter bangsa yang utuh.

Dari pengertian kurikulum yang dikemukakan Oliva (1997:29) tersirat bahwa kurikulum berubah disebabkan oleh beberapa faktor kekuatan sosial, perkembangan/perubahan filsafat yang digunakan perkembangan psikologi terutama psikologi pendidikan dan psikologi belajar perkembangan pengetahuan, serta kepemimpinan di bidang politik dan pendidikan. Kelima faktor ini selain menjadi faktor yang menyebabkan terjadinya perubahan kurikulum tetapi juga menjadi landasan bagi pengembangan suatu kurikulum baru. Faktor kekuatan sosial dan kepemimpinan yang berpengaruh terhadap kurikulum menyebabkan kurikulum tidak dapat membebaskan diri dari kekuatan politik sesuai dengan ungkapan bahwa *"curriculum is politically viable"*. Kurikulum baru dapat dinyatakan berlaku apabila sesuai dengan kemauan politik dan tidak dapat menempatkan diri sepenuhnya sebagai suatu produk pendidikan. Perubahan kurikulum di Amerika Serikat, Inggris, Australia, Jepang, Korea Selatan, dan banyak negara lain termasuk Indonesia menunjukkan perubahan kurikulum yang terjadi karena perubahan kebijakan politik dan perubahan kekuatan sosial yang kemudian berwujud pada kebijakan politik.

B. Fungsi Kurikulum

Dilihat dari cakupan dan tujuannya menurut Mc.Neil (1990) isi kurikulum memiliki empat fungsi, yaitu 1) fungsi pendidikan umum (*Common and General Education*). 2) suplementasi (*Supplementation*), 3) eksplorasi (*Esploration*) dan 4) keahlian (*Specialization*).

1. Fungsi Pendidikan Umum (Common and General Education)

Fungsi pendidikan umum (*Common and General Education*) yaitu fungsi kurikulum untuk mempersiapkan peserta didik agar mereka menjadi anggota masyarakat yang bertanggung jawab sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab. Kurikulum harus memberikan pengalaman belajar kepada setiap peserta didik agar mampu menginternalisasi nilai-nilai dalam kehidupan, memahami setiap hak dan kewajiban sebagai anggota masyarakat dan makhluk sosial. Dengan demikian, fungsi kurikulum ini harus diikuti oleh setiap siswa pada jenjang dan level atau jenis pendidikan manapun.

2. Suplementasi (Supplementation)

Setiap peserta didik memiliki perbedaan baik dilihat dari perbedaan kemampuan, perbedaan minat maupun perbedaan bakat. Kurikulum sebagai alat pendidikan seharusnya dapat memberikan pelayanan kepada setiap siswa sesuai dengan perbedaan tersebut. Dengan demikian setiap anak memiliki kesempatan untuk menambah kemampuan dan wawasan yang lebih baik sesuai dengan minat dan bakatnya. Artinya, peserta didik yang memiliki kemampuan di atas rata-rata harus terlayani untuk mengembangkan kemampuannya secara optimal; sebaliknya

siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata juga harus terlayani sesuai dengan kemampuannya.

3. Eksplorasi (Eksploration)

Fungsi eksplorasi memiliki makna bahwa kurikulum harus dapat menemukan dan mengembangkan minat dan bakat masing-masing siswa. Melalui fungsi ini siswa diharapkan dapat belajar sesuai dengan minat dan bakatnya, sehingga memungkinkan mereka akan belajar tanpa adanya paksaan. Namun demikian, proses eksplorasi terhadap minat dan bakat siswa bukan pekerjaan yang mudah. Adakalanya terjadi pemaksaan dari pihak luar, misalnya para orang tua, yang sebenarnya anak tidak memiliki bakat dan minat terhadap bidang tertentu, mereka dipaksa untuk memilihnya hanya kerana alasan-alasan tertentu yang sebenarnya tidak rasional. Oleh sebab itu para pengembang kurikulum mesti dapat menggali rahasia keberbakatan anak yang kadang-kadang tersembunyi.

4. Keahlian (Spesialization)

Kurikulum berfungsi untuk mengembangkan kemampuan anak sesuai dengan keahliannya yang didasarkan atas minat dan bakat siswa. Dengan demikian kurikulum harus memberikan pilihan berbagai bidang keahlian misalnya, perdagangan, pertanian, industri atau disiplin akademik. Bidang-bidang semacam itu yang diberikan sebagai pilihan, yang pada akhirnya setiap peserta didik memiliki keterampilan-keterampilan sesuai dengan bidang spesialisasinya. Untuk itu pengembangan kurikulum harus melibatkan para spesialis untuk menentukan kemampuan apa yang harus dimiliki setiap siswa sesuai dengan bidang keahliannya.

Memperhatikan fungsi-fungsi di atas, maka jelas kurikulum berfungsi untuk setiap orang atau lembaga yang berhubungan baik langsung maupun tidak langsung dengan penyelenggaraan pendidikan. Nah, sekarang coba Anda pikirkan atau diskusikan dengan teman Anda, kira-kira apa saja fungsi kurikulum, untuk guru, siswa, kepala sekolah, pengawas, orang tua dan masyarakat.

Bagi guru, kurikulum berfungsi sebagai pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran. Proses pembelajaran yang tidak berpedoman kepada kurikulum, maka tidak akan berjalan dengan efektif, sebab pembelajaran adalah proses yang bertujuan, sehingga segala sesuatu yang dilakukan guru dan siswa diarahkan untuk mencapai tujuan; sedangkan arah dan tujuan pembelajaran beserta bagaimana cara dan strategi yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan itu merupakan komponen penting dalam sistem kurikulum.

Bagi kepala sekolah, kurikulum berfungsi untuk menyusun perencanaan dan program sekolah. Dengan demikian, penyusunan kalender sekolah, pengajuan sarana dan prasarana sekolah kepada dewan sekolah, penyusunan berbagai kegiatan sekolah baik yang menyangkut kegiatan ekstra kurikuler dan kegiatankegiatan lainnya, harus didasarkan pada kurikulum. Bagi pengawas, kurikulum akan berfungsi sebagai panduan dalam melaksanakan supervisi. Dengan demikian, dalam proses pengawasan para pengawas akan dapat menentukan apakah program sekolah termasuk pelaksanaan proses pembelajaran yang dilakukan oleh guru sudah sesuai dengan tuntutan kurikulum atau belum, sehingga berdasarkan kurikulum itu juga pengawas dapat memberikan saran perbaikan.

Pendidikan adalah usaha bersama. Tidak mungkin tujuan pendidikan akan berhasil secara optimal manakala semuanya dibebankan pada guru atau sekolah. Dalam kaitan inilah orang tua perlu memahami tujuan serta proses pembelajaran yang dilaksanakan oleh sekolah. Dengan demikian fungsi kurikulum bagi orang tua adalah sebagai pedoman untuk memberikan bantuan baik bagi penyelenggaraan program sekolah, maupun membantu putra/putri mereka belajar di rumah sesuai dengan program sekolah. Melalui kurikulum orang tua akan mengetahui tujuan yang harus dicapai serta ruang lingkup materi pelajaran.

Bagi siswa itu sendiri, kurikulum berfungsi sebagai pedoman belajar. Melalui kurikulum siswa akan memahami apa yang harus dicapai, isi atau bahan pelajaran apa yang harus dikuasai, dan pengalaman belajar apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Berkaitan dengan fungsi kurikulum, Alexander Inglis (dalam Hamalik, 2011: 13-14)) mengemukakan enam fungsi kurikulum untuk siswa:

5. Fungsi Penyesuaian (The Adjustive or Adaptive Function)

Yang dimaksud dengan fungsi penyesuaian adalah bahwa kurikulum harus dapat mengantarkan siswa agar mampu menyesuaikan diri dalam kehidupan sosial masyarakat. Mengapa kurikulum harus memiliki fungsi penyesuaian? Oleh sebab kehidupan masyarakat tidak bersifat statis, akan tetapi dinamis, artinya kehidupan masyarakat selalu berubah dan berkembang sesuai dengan perkembangan jaman. Oleh sebab itu, siswa harus dapat beradaptasi dalam kehidupan masyarakat yang cepat berubah itu. Dalam rangka inilah fungsi penyesuaian kurikulum diperlukan. Nah, sekarang coba Anda pikirkan bagaimana agar kurikulum memiliki fungsi penyesuaian?

6. Fungsi Integrasi (The Integrating Function)

Fungsi integrasi dimaksudkan bahwa kurikulum harus dapat mengembangkan pribadi siswa secara utuh. Kemampuan kognitif, afektif dan psikomotor harus berkembang secara terintegrasi. Mengapa demikian? Sebab, kurikulum bukan hanya diharapkan dapat mengembangkan kemampuan intelektual atau kecerdasasan saja, akan tetapi juga harus dapat membentuk sikap sesuai dengan sistem nilai yang berlaku di masyarakat, serta dapat memberikan keterampilan untuk dapat hidup di lingkungan masyarakatnya.

7. Fungsi Diferensiasi (The Differentiating Function)

Yang dimaksud dengan fungsi diferensiasi adalah, bahwa kurikulum harus dapat melayani setiap siswa dengan segala keunikannya. Mengapa demikian? Sebab siswa adalah organisme yang unik, yakni memiliki perbedaan-perbedaan, baik perbedaan minat, bakat maupun perbedaan kemampuan. Dapat dipastikan di dunia ini tidak akan ada manusia yang sama. Walaupun keadaan fisik mungkin ada yang sama, akan tetapi belum tentu dilihat dari faktor psikologisnya juga sama.

8. Fungsi Persiapan (The Propaedeutic Function)

Fungsi persiapan mengandung makna, bahwa kurikulum harus dapat memberikan pengalaman belajar bagi anak baik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi, maupun untuk kehidupan di masyarakat. Bagi anak yang memiliki potensi untuk belajar pada jenjang yang lebih tinggi, maka kurikulum harus membekali mereka dengan berbagai pengetahuan yang diperlukan agar mereka dapat mengikuti pelajaran pada level pendidikan di atasnya; namun bukan itu saja, kurikulum juga harus membekali mereka agar dapat

belajar di masyarakat, bagi mereka yang tidak memiliki potensi untuk melanjutkan pendidikannya.

9. Fungsi Pemilihan (The Selective Function)

Fungsi pemilihan adalah fungsi kurikulum yang dapat memberikan kesempatan kepada setiap siswa untuk belajar sesuai dengan bakat dan minatnya. Kurikulum harus bersifat fleksibel, artinya menyediakan berbagai pilihan program pendidikan yang dapat dipelajari. Hal ini sangat penting, sebab seperti yang telah dikemukakan di atas, siswa memiliki perbedaan-perbedaan, dan kurikulum harus melayani setiap perbedaan siswa.

10. Fungsi Diagnostik (The Diagnostic Function)

Fungsi diagnostik, adalah fungsi untuk mengenal berbagai kelemahan dan kekuatan siswa. Melalui fungsi ini kurikulum berperan untuk menemukan kesulitan-kesulitan dan kelemahan yang dimiliki siswa, disamping mengeksplorasi berbagai kekuatan-kekuatan sehingga melalui pengenalan itu siswa dapat berkembang sesuai dengan potensi yang dimilikinya.

C. Tujuan Kurikulum

Sebagai alat pendidikan, tentu kurikulum diciptakan bukan tanpa tujuan. Bahkan, kurikulum muncul dan terus berkembang agar dapat mencapai tujuan pendidikan. Tujuan utama kurikulum adalah untuk mempersiapkan peserta didik agar dapat menjadi pribadi serta warga negara yang kreatif, inovatif, beriman, dan juga afektif ketika dia berada pada lingkungan masyarakat kelak.

Selain itu, kurikulum juga bertujuan untuk mendidik dan membimbing peserta didik agar dapat berkontribusi

secara positif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Di Indonesia, tujuan pendidikan dirumuskan antara lain sebagai berikut:

1. Tujuan pendidikan dasar yang meletakkan fondasi dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan siap mengikuti jenjang pendidikan lebih lanjut.
2. Tujuan pendidikan menengah, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan agar peserta didik dapat hidup mandiri dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
3. Tujuan pendidikan menengah kejuruan, yaitu pendidikan yang meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan sehingga dapat hidup mandiri dan dapat mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

BAB II

SISTEM PENDIDIKAN NASIONAL

A. Pengertian Pendidikan Nasional

Pendidikan, sebagaimana yang tertuang dalam UU RI No. 20 Tahun 2003 pasal 1 ayat 1, merupakan usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara. Adapun dalam pasal 1 ayat 2 dinyatakan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman.

Pendidikan nasional sebagai usaha untuk mengembangkan potensi diri peserta didik harus tanggap terhadap dinamika perkembangan zaman. Hal ini supaya pendidikan nasional tetap bisa eksis dan lebih jauh *survive* untuk menghadapi tantangan dunia yang semakin global dan kompetitif. Akan tetapi, apabila dicermati secara lebih mendalam, pendidikan nasional yang berlangsung saat ini dalam dataran filosofis masih menjadi objek tarik menarik dari berbagai pihak. Pihak tersebut dibagi menjadi 3 kelompok yaitu :

1. Kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai sistem. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan nasional pada hakikatnya merupakan kesatuan yang bulat dari input, proses, dan output. Berdasarkan

sisdiknas, pendidikan nasional diselenggarakan sebagai kesatuan sistemik dengan sistem terbuka dan sistem multimakna. Maksudnya adalah pendidikan dijadikan sebagai sebuah siklus yang bersifat mekanis dengan berorientasi pada kualitas output.

Pendidikan yang demikian memiliki nilai positif berupa hasil didik yang berkualitas dalam hal intelektualitas. Akan tetapi, terdapat pula sisi negatif, yakni lemah dalam hal *skill* dan sifat humanisnya.

2. Kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai tujuan. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan nasional dijadikan sebagai tujuan dari proses pendidikan itu sendiri. Oleh sebab itu, pendidikan nasional menjadi sebuah entitas atau wujud yang seolah-olah tidak menginjak bumi Indonesia yang sarat problem-problem nasional. Hal ini berakibat pendidikan nasional tidak mampu menyentuh kehidupan masyarakat luas.
3. Kelompok yang menjadikan pendidikan sebagai proses. Kelompok ini berasumsi bahwa pendidikan adalah sebuah kegiatan yang tidak terlepas dari kegiatan kehidupan manusia Indonesia dan berlangsung secara terus menerus. Apabila pendidikan nasional dianggap sebagai sebuah proses, maka dengan sendirinya pendidikan nasional akan berlangsung selama bangsa Indonesia “eksis” dan akan berlangsung terus menerus. (Kadir & dkk, 2012)

B. Pengertian Sistem Pendidikan Nasional

Sistem berasal dari bahasa Yunani yang berarti hubungan fungsional yang teratur antara unit-unit komponen-komponen. Tatang M. Arifin mengemukakan

pengertian sistem sebagai suatu keseluruhan yang tersusun dari bagian-bagian yang satu dengan lainnya saling berhubungan secara teratur untuk mencapai suatu tujuan. Sedangkan menurut Banathy, sistem merupakan suatu organisme sintetik yang dirancang secara sengaja, terdiri atas komponen-komponen yang saling terkait dan saling berinteraksi yang dimanfaatkan agar berfungsi secara terintegrasi untuk mencapai suatu tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. (Kadir & dkk, 2012)

Berdasarkan definisi tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa sistem adalah sebuah struktur fungsional yang tersusun dari bagian-bagian yang berhubungan secara sistematis untuk mencapai sebuah tujuan tertentu. Unsur-unsur pokok sistem berdasarkan pengertian diatas yaitu proses, isi, dan tujuan. Maka dapat diartikan bahwa sistem pendidikan nasional adalah struktur fungsional pada pendidikan nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional Indonesia.

Berdasarkan UU RI No. 20 Tahun 2003 Pasal 1 ayat 3, sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Menurut Abdul Kadir dkk, sisdiknas dirumuskan dengan misi utama dapat memberi pendidikan dasar bagi setiap warga negara Republik Indonesia. Hal ini bertujuan supaya tiap-tiap warga negara memperoleh sekurang-kurangnya pengetahuan dan kemampuan dasar. Kemampuan dasar tersebut meliputi kemampuan membaca, menulis, dan berhitung serta mampu menggunakan bahasa Indonesia yang diperlukan oleh setiap warga negara untuk dapat berperan serta dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Sisdiknas memberikan kesempatan belajar yang seluas-luasnya kepada setiap warga negara. Oleh karena itu, perlakuan yang berbeda terhadap peserta didik tidak dibenarkan. Perbedaan atas dasar jenis kelamin, agama, ras, suku, latar belakang sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi merupakan hal yang dilarang. Akan tetapi, hal tersebut dapat terjadi kecuali apabila ada satuan atau kegiatan pendidikan yang memiliki kekhususan yang harus diindahkan. (Kadir & dkk, 2012)

Sisdiknas diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta dibawah tanggung jawab Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan menteri lainnya, seperti pendidikan agama oleh menteri agama, akabri oleh menteri pertahanan dan keamanan. Selain itu juga departemen lainnya yang menyelenggarakan pendidikan yang disebut diklat. Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui bentuk-bentuk kelembagaan beserta program-programnya. (Tirtarahardja & Sulo, 2005)

C. Kelembagaan, Program, dan Pengelolaan Pendidikan Nasional

Penyelenggaraan sistem pendidikan nasional dilaksanakan melalui lembaga-lembaga pendidikan baik dalam bentuk sekolah maupun dalam bentuk kelompok belajar (dalam bahasa UUSPN No. 2 Tahun 1989) atau melalui pendidikan formal, nonformal, dan informal (dalam bahasa UUSPN No. 20 Tahun 2003).

1. Kelembagaan Pendidikan

Dalam kelembagaan pendidikan, hal yang akan dibahas yaitu jalur pendidikan dan jenjang pendidikan. Pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

a. Jalur Pendidikan

Penyelenggaraan sisdiknas berdasarkan UU RI No. 2 Tahun 1989 dibedakan menjadi dua jalur yaitu:

1) Jalur Pendidikan Sekolah

Jalur pendidikan sekolah merupakan pendidikan yang diselenggarakan disekolah melalui kegiatan belajar mengajar secara berjenjang dan berkesinambungan (pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi). Ciri-ciri jalur pendidikan formal yaitu sifatnya formal; Diatur berdasarkan ketentuan pemerintah; dan mempunyai keseragaman pola yang bersifat nasional.

2) Jalur Pendidikan Luar Sekolah (PLS)

Jalur pendidikan luar sekolah (PLS) merupakan pendidikan yang bersifat kemasyarakatan yang dilaksanakan diluar sekolah melalui kegiatan belajar mengajar yang tidak berjenjang dan tidak berkesinambungan, seperti kepramukaan, berbagai kursus, dan lain-lain. PLS memberikan kemungkinan perkembangan sosial, kultural seperti bahasa dan kesenian, keagamaan, dan keterampilan yang dapat dimanfaatkan oleh anggota asyarakat untuk mengembangkan dirinya dan membangun masyarakatnya.

Pendidikan Luar Sekolah memiliki sifat tidak formal – dalam arti tidak ada keseragaman pola yang bersifat nasional – dan modelnya sangat beragam. Dalam hubungan ini, pendidikan keluarga merupakan bagian dari jalur PLS yang diselenggarakan dalam keluarga yang fungsi utamanya menanamkan keyakinan agama, nilai budaya dan moral, serta keterampilan praktis. (Kadir & dkk, 2012)

Sedangkan menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003 Bab VI Pasal 13, jalur pendidikan terdiri atas pendidikan formal, nonformal, dan informal yang dapat saling melengkapi dan

memperkaya. Pendidikan tersebut diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan/atau melalui jarak jauh.

b. Jenjang Pendidikan

Berdasarkan UUSPN No. 2 Tahun 1989, Jenjang pendidikan adalah suatu tahap dalam pendidikan berkelanjutan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik serta keluasan dan kedalaman dalam pengajaran. Sedangkan menurut UUSPN No. 20 Tahun 2003, jenjang pendidikan adalah tahapan pendidikan yang ditetapkan berdasarkan tingkat perkembangan peserta didik, tujuan yang akan dicapai, dan kemampuan yang dikembangkan.

Dalam Sisdiknas terdapat tiga jenjang pendidikan yaitu:

1) Jenjang Pendidikan Dasar

Pendidikan dasar diselenggarakan untuk memberi bekal dasar yang diperlukan untuk hidup dalam masyarakat. Bekal tersebut berupa pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dasar. Berdasarkan UUSPN No. 20 Tahun 2003 Pasal 17, Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Pendidikan Dasar berbentuk Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI) atau bentuk lain yang sederajat serta Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs), atau bentuk lain sederajat.

Oleh karena itu, pendidikan dasar menyediakan kesempatan bagi seluruh warga negara untuk memperoleh pendidikan dasar. Selain itu, setiap warga negara diwajibkan menempuh pendidikan dasar sampai pendidikan tinggi.